

## **V. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Kepala Pekon Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon Gumukrejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Tahun 2011-2015**

Pemerintahan Pekon Gumukrejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon Gumukrejo pada tahun 2011-2015. Pada proses penyusunan RPJM Pekon Gumukrejo ini melibatkan berbagai unsur pemerintahan pekon seperti Lembaga Kemasyarakatan yang salah satunya yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pemerintah Pekon, Badan Permusyawaratan Pekon, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan juga masyarakat Pekon Gumukrejo. Di dalam penyusunan RPJM tersebut masing-masing lembaga pekon memiliki peran penting dalam penyusunan RPJM Pekon Gumukrejo ini. Tetapi dalam penelitian ini akan berfokus pada peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan kepala pekon dalam proses penyusunan RPJM Pekon Gumukrejo.

Di dalam proses penyusunan RPJM setidaknya harus melalui beberapa tahapan yaitu persiapan, pelaksanaan, dan pelembagaan. Di dalam penelitian ini ingin melihat seberapa besar peran dari Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat (LPM) dan Kepala Pekon Gumukrejo dalam proses penyusunan RPJM Pekon Gumukrejo ini pada tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelembagaan sehingga RPJM Pekon Gumukrejo dapat tersusun melalui Musrenbang.

Bertitik tolak dari penjelasan di atas, berikut ini pemaparan mengenai peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Kepala Pekon Gumukrejo dalam proses penyusunan RPJM pada tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelembagaan.

## **1. Persiapan**

### **a. Menyusun Jadwal dan Agenda**

Pada tahap penyusunan jadwal dan agenda musrenbang Pekon Gumukrejo, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintah pekan masing-masing bekerja sama dalam menentukan jadwal dan agenda musrenbang. Hal ini dilakukan dengan melakukan pertemuan terlebih dahulu sebelum dilakukannya musrenbang. Di dalam pertemuan tersebut akan dibicarakan mengenai kapan kegiatan musrenbang Pekon Gumukrejo akan berlangsung dan agenda apa saja yang akan dibicarakan dalam musrenbang.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kepala Pekon Gumukrejo dalam menentukan jadwal dan agenda musrenbang, hal ini diungkapkan oleh Bapak Somad selaku ketua LPM Pekon Gumukrejo yang menyatakan :

“Yang pasti itu dari LPM yang berkoordinasi dengan pemerintah desa yang diwakili oleh kepala desa kira-kira kapan akan dilaksanakannya Musrenbang dan agenda apa saja yang akan dibicarakan dalam Musrenbang. LPM dan pemerintah desa sama-sama ikut andil dalam menentukan jadwal dan agenda Musrenbang.”

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Rohiman selaku Kepala Pekon Gumukrejo yang menyatakan :

”LPM menyusun jadwal dan agenda Musrenbang kemudian dikoordinasikan kepada kepala desa dan dimusyawarahkan kira-kira kapan akan dilaksanakan Musrenbang itu, kalau sudah disesuaikan jadwalnya tinggal dilaksanakan saja Musrenbangnya”

Berdasarkan pernyataan Bapak Rohiman selaku Kepala Pekon Gumukrejo dapat diketahui bahwa Lembaga Pemberdayaan masyarakat (LPM) menyusun jadwal dan agenda terlebih dahulu kemudian dimusyawarahkan dengan kepala pekon untuk menentukan jadwal dan agenda musrenbang. Kerjasama antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan Kepala Pekon Gumukrejo pada tahap penyusunan jadwal dan agenda musrenbang ini dapat terlihat dengan dilakukannya koordinasi dan musyawarah untuk menentukan jadwal dan agenda apa saja yang akan diangkat dalam musrenbang Pekon Gumukrejo.

Pada proses penyusunan jadwal dan agenda musrenbang antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan kepala pekon melakukan musyawarah untuk menentukan jadwal dan agenda dalam musrenbang, hal ini terungkap dalam wawancara kepada Bapak Somad selaku ketua

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang menyatakan :

”LPM dan pemerintah desa melakukan musyawarah untuk menentukan kapan akan dilakukannya Musrenbang dan agenda apa saja yang akan dibicarakan dalam Musrenbang itu.”

Hal senada juga dikatakan oleh Bapak Rohiman selaku Kepala Pekon Gumukrejo yang menyatakan :

”Dibicarakan bersama-sama dengan pemerintah desa yang diwakili oleh kepala desa dan juga LPM untuk menentukan kapan dilaksanakan Musrenbangnya.”

Pada dasarnya antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan Kepala Pekon harus berperan aktif dalam proses penyusunan RPJM, hal ini dikarenakan kedua lembaga ini merupakan ujung tombak dari terbentuknya RPJM di Pekon Gumukrejo. Melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) aspirasi masyarakat Pekon Gumukrejo diserap dan kemudian disampaikan kepada pemerintah pekon yang diwakili oleh kepala pekon untuk dimusyawarahkan apa saja yang menjadi keinginan masyarakat Pekon Gumukrejo dalam hal pembangunan yang nantinya akan diangkat dalam musrenbang.

Pada penyusunan jadwal dan agenda Musrenbang, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan kepala pekon berperan dalam menentukan jadwal dan agenda musrenbang yang akan dilaksanakan. Peran keduanya sangat penting karena dari LPM dan kepala pekon jadwal dan agenda musrenbang ditentukan, sehingga awal mula persiapan musrenbang itu berasal dari LPM dan kepala pekon. LPM dan

kepala pekon pada dasarnya harus saling membantu untuk mensukseskan acara musrenbang sehingga dengan suksesnya acara musrenbang ini diharapkan akan terciptanya RPJM yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki pekon. Kemampuan dalam hal ini adalah kemampuan dari segi anggaran atau dana maupun tenaga.

**b. Mengumumkan Secara Terbuka Kepada Masyarakat Mengenai Agenda Musrenbang Pekon**

Pada tahap ini Lembaga Pemberdayaan masyarakat (LPM) yang bekerjasama dengan para kepala dusun dan RT untuk mengumumkan secara terbuka kepada warga Pekon Gumukrejo mengenai agenda musrenbang yang akan dilaksanakan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) bekerjasama dengan para kepala dusun dan RT bertujuan untuk mempermudah dalam mengumumkan agenda musrenbang yang akan dilaksanakan dan diharapkan seluruh warga Pekon Gumukrejo dapat mengetahui apa saja agenda yang akan dilaksanakan dalam musrenbang tersebut dan juga mengharapkan kedatangan warga pekon untuk menyampaikan pendapat atau aspirasinya serta pandangan terhadap permasalahan pembangunan yang ada di Pekon Gumukrejo, sehingga dapat memberikan masukan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan juga Pemerintah Pekon Gumukrejo untuk menentukan kegiatan pembangunan apa saja yang akan dijadikan prioritas untuk dimasukkan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pekon Gumukrejo.

Pada kegiatan ini Lembaga Pemberdayaan masyarakat (LPM) berperan untuk mengkoordinir para kepala dusun dan juga RT untuk mengumumkan jadwal dan agenda musrenbang yang akan dilaksanakan. Hal tersebut terlihat dari pernyataan Bapak Somad selaku ketua LPM yaitu :

“LPM mengkoordinir kadus atau RT untuk mengumumkan agenda musrenbang kepada warga desa dan agar dapat datang dalam acara Musrenbang yang akan diadakan di balai desa.”

Hal senada juga dinyatakan oleh Bapak Rohiman selaku Kepala Pekon Gumukrejo yang menyatakan :

“Biasanya sih pak Kadus dengan dibantu dengan pak RT untuk mengumumkan segala kegiatan yang ada di desa yang sebelumnya dikoodinir oleh LPM.”

Berdasarkan pernyataan kedua narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mengumumkan agenda musrenbang kepada warga pekon Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) berperan dalam mengkoordinasi para kepala dusun dan RT dalam mengumumkan agenda musrenbang.

Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengumumkan kepada warga Pekon Gumukrejo di dalam acara pengajian rutin yang biasanya dilakukan pada malam jumat atau jumat siang. Kegiatan ini diumumkan pada saat pengajian rutin dikarenakan banyaknya warga pekon yang berkumpul pada saat pengajian sehingga akan lebih efektif dan cepat dalam mengumumkan agenda musrenbang yang akan dilaksanakan.

Kegiatan mengumumkan agenda musrenbang Pekon Gumukrejo dilakukan melalui pengajian rutian yang biasanya dilakukan setiap malam jumat dapat diketahui melalui pernyataan oleh Bapak Somad selaku ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yaitu :

“Caranya diumumkan dalam acara-acara pengajian rutin biasanya setiap malam jumat atau pada acara kumpulan warga desa.”

Hal senada juga dikatakan oleh Bapak Darman selaku Sekretaris Pekon Gumukrejo yang mengatakan :

“Caranya ya diumumkan saja oleh pak RT kepada warganya. Biasanya si di dalam pengajian rutin setiap malem jumat.”

Mengumumkan agenda musrenbang melalui acara pengajian rutin dilakukan dikarenakan akan lebih efektif dan cepat dibandingkan untuk mendatangi satu-persatu rumah warga, hal tersebut akan memakan waktu yang lama dan juga keterbatasan jumlah orang yang bertugas dalam mengumumkan agenda musrenbang tersebut kepada warga Pekon Gumukrejo. Pengumuman agenda musrenbang desa melalui acara pengajian rutin agar lebih cepat dan mempermudah para kepala dusun dan RT dalam menjalankan tugasnya yang dikoordinir oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Kerjasama yang baik antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan kepala dusun dan RT diperlukan agar pada kegiatan ini dapat berjalan lancar sehingga agenda musrenbang yang akan dilaksanakan dapat diketahui oleh seluruh warga Pekon Gumukrejo. Selain kerjasama, koordinasi yang baik juga sangat

diperlukan antara LPM dengan kepala dusun dan juga RT agar agenda musrenbang dapat diketahui oleh seluruh warga Pekon Gumukrejo.

Seharusnya LPM juga mengajak pemerintah pekan yang lainnya untuk ikut dalam mengumumkan agenda musrenbang yang akan dilaksanakan seperti para kepala urusan atau kaur ataupun sekretaris pekan juga ikut dalam acara ini, dengan demikian keterbatasan personil dalam mengumumkan agenda musrenbang kepada warga Pekon Gumukrejo akan teratasi sehingga warga Pekon Gumukrejo akan lebih banyak lagi yang mengetahui mengenai agenda musrenbang yang akan dilaksanakan oleh Pekon Gumukrejo.

Bertitik tolak dari hal tersebut seharusnya seluruh unsur Pemerintahan Pekon Gumukrejo harus saling bekerjasama dalam mengumumkan kepada warga Pekon Gumukrejo mengenai agenda musrenbang yang akan dilaksanakan, sehingga dengan adanya keterlibatan seluruh unsur pemerintahan maka kegiatan ini akan berjalan dengan baik dan lebih maksimal lagi.

### **c. Membuka Pendaftaran Atau Mengundang Calon Peserta**

Pada tahap ini dibentuk panitia musrenbang yang dikoordinir oleh LPM melalui musyawarah yang melibatkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), pemerintah Pekon, kepala dusun dan juga RT. Calon peserta musrenbang ini terdiri dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala dusun, RT,



kepala pekon dan perangkatnya, serta warga Pekon Gumukrejo.

Panitia musrenbang yang terdiri dari berbagai unsur seperti LPM, pemerintah pekon, kepala dusun, dan RT bertugas untuk membuka pendaftaran dan mengundang para calon peserta, hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Somad selaku ketua LPM yaitu :

“Yang mengundang calon peserta yaitu panitia Musrenbang yang terdiri dari unsur LPM, pemerintah desa, dan kadus atau RT.”

Hal yang sama juga dinyatakan oleh Bapak Darman selaku Sekretaris Pekon Gumukrejo yang mengatakan :

“Yang mengundang ya pada awalnya dari pihak panitia musrenbang yang terdiri dari unsur LPM, pemerintah desa, kadus dan RT.”

Pada tahap ini penitia musrenbang mengundang seluruh calon peserta musrenbang agar dapat hadir dalam acara musrenbang pekon agar dapat memberikan masukan atau usulan mengenai rencana pembangunan yang akan dimusyawarahkan dalam musrenbang ini, dengan demikian diharapkan atas masukan ataupun usulan dari peserta musrenbang ini dapat memberikan pertimbangan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Pekon Gumukrejo dalam menentukan pembangunan apa saja yang akan diprioritaskan dan nantiya akan dimasukkan ke dalam RPJM Pekon Gumukrejo.

Peran dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan juga Kepala Pekon Gumukrejo dalam tahap ini yaitu ikut serta dalam mengundang para calon peserta musrenbang pekon, walaupun dalam hal ini Kepala Pekon Gumukrejo dan Ketua LPM hanya mengkoodinir dan mengawasi saja. Para perangkat pekon dan anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang turun langsung pada tahap membuka pendaftaran atau mengundang calon peserta musrenbang.

Pada tahap ini calon peserta yang diundang dalam acara musrenbang ialah para tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala dusun, RT, kepala pekon dan perangkatnya, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), serta warga Pekon Gumukrejo. Dengan adanya seluruh komponen masyarakat Pekon Gumukrejo nantinya diharapkan akan tersaring aspirasi dari seluruh komponen masyarakat yang ada sehingga hasilnya nanti akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Pekon Gumukrejo.

Diundangnya seluruh komponen masyarakat yang ada disebabkan karena pada dasarnya acara musrenbang ini merupakan suatu musyawarah untuk menentukan prioritas-prioritas pembangunan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Penentuan prioritas pembangunan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang ada sehingga dalam acara musrenbang ini sangat diperlukan masukan-masukan dari seluruh komponen masyarakat yang ada di Pekon Gumukrejo.

#### **d. Menyiapkan Peralatan, Bahan Materi, dan Notulen**

Pada tahap ini panitia musrenbang yang terdiri dari unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan pemerintah pekon, serta perangkat pekon lainnya menyiapkan peralatan, bahan materi, dan notulen. Khusus untuk bahan materi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) berkonsultasi dengan PNPM Mandiri Pedesaan dan juga tim penyusun rancangan RPJM sebagai bahan pertimbangan kira-kira materi apa saja yang akan diangkat dalam musrenbang nantinya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Darman selaku Sekretaris Pekon Gumukrejo yang menyatakan :

“Ya panitia musrenbang, seperti dari unsur LPM, pemerintah desa, dan juga dibantu dengan masyarakat. Khusus untuk bahan materi itu biasanya LPM dibantu dengan pihak dari PNPM mandiri yang ada di desa kita dan juga tim penyusun rancangan RPJM”

Hal yang sama juga dinyatakan oleh Bapak Somad selaku ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang mengatakan :

“Yang menyiapkan panitia Musrenbang baik itu dari LPM ataupun dari perangkat desa, tetapi khusus dalam menyiapkan bahan materi LPM meminta masukan kepada PNPM Mandiri Pedesaan yang ada di Desa Gumukrejo dan tim penyusun rancangan RPJM untuk memberikan masukan tentang materi apa saja yang akan diangkat dalam musrenbang nantinya.”

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam menyiapkan materi yang akan di angkat dalam musrenbang meminta bantuan dari PNPM Mandiri Pedesaan yang ada di Pekon Gumukrejo dan tim penyusun rancangan RPJM untuk memberikan masukan sebagai bahan

pertimbangan tentang materi yang akan di angkat dalam musrenbang nantinya.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam menyiapkan materi meminta masukan kepada PNPM Mandiri Pedesaan yang ada di Pekon Gumukrejo hal ini dikarenakan sebagian pembangunan yang akan dilaksanakan merupakan hasil kerjasama dengan PNPM Mandiri Pedesaan yang ada di Pekon Gumukrejo. Sehingga masukan-masukan dari PNPM Mandiri Pedesaan sangat penting sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan RPJM nantinya. Adanya koordinasi yang baik antara pemerintahan Pekon Gumukrejo dengan PNPM Mandiri Pedesaan akan mempermudah menentukan rencana pembangunan yang ada sehingga akan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada.

Adanya tim penyusun rancangan RPJM Pekon Gumukrejo ini juga turut memberikan masukan kepada panitia musrenbang tentang materi-materi apa saja yang akan diangkat dalam musrenbang desa nantinya, hal ini juga sesuai dengan pernyataan Bapak Darman selaku Sekretaris Pekon Gumukrejo yang mengatakan :

“Yang nyusun itu panitia musrenbang yaitu LPM dan pemerintah desa serta dibantu dengan pihak dari PNPM mandiri yang ada di desa kita serta tim penyusun rancangan RPJM yang telah dibentuk.”

Dalam proses penyusunan RPJM Pekon Gumukrejo dibentuk suatu tim penyusun rancangan RPJM Pekon Gumukrejo oleh Kepala Pekon yang beranggotakan kepala pekon yaitu Bapak Rohiman, sekretaris pekon yaitu Bapak Darman, LPM yaitu Bapak Somad, Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPMD) yaitu Bapak Agung Wibowo dan Ibu Maryani, kepala dusun yaitu Bapak Sukowo dan Kasino, dan wakil dari masyarakat yaitu Bapak Madiyo Suwito. Tim penyusun rancangan RPJM Pekon Gumukrejo ini bertugas untuk menyusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon Gumukrejo Tahun 2011-2015 yang berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Pekon dan perumusan visi dan misi pekon yang dilakukan secara partisipatif.

Dibentuknya tim penyusun Rancangan RPJM ini dimaksudkan adalah untuk menyusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang nantinya rancangan ini akan di bawa di dalam musrenbang Pekon Gumukrejo untuk dimusyawarahkan apakah usulan rancangan RPJM ini akan disetujui atau masih terdapat kekurangan-kekurangan ataupun ketidak sesuaian mengenai isi dari Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) maka akan di perbaiki dan disesuaikan terhadap hasil musrenbang yang telah dilaksanakan.

## 2. Pelaksanaan

### a. Pendaftaran Peserta

Pada tahap ini proses pendaftaran peserta musrenbang dilakukan oleh panitia musrenbang Pekon Gumukrejo yang terdiri dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan perangkat desa yang lainnya yang ditugaskan untuk menjadi panitia musrenbang Pekon Gumukrejo. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Rohiman selaku Kepala Pekon Gumukrejo yang mengatakan bahwa :

“Panitia Musrenbang seperti LPM dan perangkat desa yang ditugaskan untuk menjadi panitia dalam acara Musrenbang.”

Hal yang sama juga dinyatakan oleh Bapak Eka Setiawan selaku Kepala Urusan Pemerintahan yang menyatakan bahwa :

“Panitia Musrenbang yang bertugas dalam proses pendaftaran peserta musrenbang.”

Di dalam proses pendaftaran peserta musrenbang, sebelum peserta memasuki ruangan harus mengisi daftar hadir terlebih dahulu sebelum mengikuti acara musrenbang tersebut, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa di dalam proses pendafatara peserta musrenbang dilakukan oleh panitia musrenbang yang terdiri dari unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan juga perangkat pekon yang ditugaskan sebagai panitia musrenbang Pekon Gumukrejo.

Pada tahap pendaftaran peserta musrenbang ini peran dari LPM dan Kepala Pekon Gumukrejo adalah mengkoordinir proses pendaftaran peserta musrenbang yang dilakukan oleh panitia musrenbang Pekon Gumukrejo. Tetapi pada tahap ini LPM cenderung lebih aktif berperan hal ini dikarenakan Kepala Pekon Gumukrejo lebih berfokus pada mempersiapkan materi tentang prioritas-prioritas pembangunan yang akan dipaparkan pada saat berjalannya musrenbang nanti.

**b. Pemaparan Kepala Pekon Atas Prioritas Kegiatan Pembangunan di Pekon**

Pada tahap ini Kepala Pekon Gumukrejo memaparkan prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan untuk 5 (lima) tahun kedepan. Prioritas kegiatan pembangunan yang di paparkan oleh Kepala Pekon Gumukrejo yaitu pembangunan Balai Pekon Gumukrejo yang dilakukan secara bertahap, pembuatan puskesmas, perbaikan jalan, pembuatan talut/siring, dan pembuatan gorong-gorong.

Pada pembuatan Balai Pekon Gumukrejo dilakukan secara bertahap untuk tahun pertama dilakukan pembuatan pondasi dan pengecoran tiang bangunan. Pada program pembuatan puskesmas saat ini telah terlaksana yang dibangun di Dusun III, kemudian pada program perbaikan jalan untuk tahun pertama atau tahun 2011 perbaikan jalan dilakukan di Dusun II dan untuk tahun 2012 ini dilakukan perbaikan jalan di Dusun I, pada program pembuatan siring telah dilakukan di Dusun I, kemudian pada program pembuatan gorong-gorong telah dilakukan di Dusun II.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Rohiman selaku Kepala Pekon Pekon Gumukrejo yang mengatakan bahwa :

“Yang menjadi prioritas pembangunan di Desa Gumukrejo ini ya seperti pembangunan balai desa, pembuatan puskesmas yang kebetulan saat ini sudah terlaksana di dusun III, perbaikan jalan, pembuatan talut/siring, dan pembuatan gorong-gorong. Kalau pembangunan balai desa itu dilakukan secara bertahap setiap tahunnya untuk tahun ini sudah dilakukan pengecoran pondasi dan tiang bangunan. Untuk masalah perbaikan jalan juga dilakukan secara bertahap untuk tahun pertama sudah dilaksanakan di Dusun II dan tahun ini sedang dilakukan perbaikan jalan di Dusun I.”

Hal yang sama juga dinyatakan oleh Bapak Tulus selaku Kepala Urusan Pembangunan yang menyatakan bahwa :

“Kegiatan pembanguana yang menjadi priorotas yang dipaparkan oleh kepala desa yaitu pembangunan balai desa yang dilakukan secara bertahap tiap tahunnya, pembangunan puskesmas, pengerasan jalan dan juga pembuatan gorong-gorong serta talut.”

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Kepala Pekon Gumukrejo dalam memaparkan prioritas rencana pembangunan yang akan dilaksanakan dilakukan dengan baik dan setelah 2 (dua) tahun berjalan yaitu pada tahun 2011 dan tahun 2012 kegiatan pembangunan tersebut telah dilaksanakan secara bertahap, hal ini mengindikasikan bahwa terdapat kesesuaian antara rencan pembangunan yang direncanakan oleh Pekon Gumukrejo dengan kenyataan yang ada di lapangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program kegiatan pembangunan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik.



Di dalam tahap ini Kepala Pekon Gumukrejo tidak hanya menjelaskan kepada peserta musrenbang tentang rencana pembangunan apa saja yang akan di jadikan prioritas tetapi juga mengajak warga pekon untuk berperan aktif secara gotong-royong dalam membantu dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dijadikan prioritas. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Rohiman selaku Kepala Pekon Gumukrejo yang menyatakan bahwa :

“Saya sebagai kepala desa tinggal menjelaskan saja kegiatan apa saja yang akan menjadi prioritas pembangunan yang nantinya akan dimasukan dalam RPJM Desa Gumukrejo. Saja juga menghimbau kepada warga desa untuk ikut membantu secara gotong-royong dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan.”

Pada tahap ini Kepala Pekon Gumukrejo telah menjalankan perannya dalam memaparan prioritas kegiatan pembangunan di Pekon Gumukrejo dalam musrenbang, pemaparan kepala pekon mengenai prioritas kegiatan pembangunan tersebut ditujukan kepada seluruh peserta musrenbang untuk dimusyawarahkan sehingga nantinya diharapkan para peserta musrenbang lainnya dapat memberikan masukan ataupun tanggapannya mengenai prioritas kegiatan pembangunan yang telah dipaparkan oleh kepala pekon.

Pemaparan mengenai prioritas pembangunan di Pekon Gumkrejo ini yang dilakukan oleh kepala pekon bertujuan untuk memberikan gambaran kepada peserta musrenbang tentang rencana pembangunan apa saja yang akan dilakukan oleh Pekon Gumukrejo. Tetapi pada

kenyataannya para peserta musrenbang di Pekon Gumukrejo kurang aktif dalam memberikan masukan-masukan mengenai pemaparan prioritas pembangunan yang disampaikan oleh kepala pekon. Hal ini menyebabkan proses berjalannya musyawarah sedikit monoton sehingga apa yang dipaparkan oleh kepala pekon kurang mendapatkan tanggapan oleh para peserta musrenbang.

Kurangnya masukan atau tanggapan dari para peserta musrenbang hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai rencana pembangunan Pekon Gumukrejo yang kurang disosialisasikan kepada para peserta musrenbang terutama para warga pekon yang hadir dalam acara musrenbang. Sehingga para peserta musrenbang hanya mendengarkan saja dan kurang aktif untuk memberikan masukan-masukan ataupun tanggapan kepada kepala pekon yang memaparkan mengenai prioritas pembangunan Pekon Gumukrejo. Dengan demikian proses dapat disimpulkan bahwa proses berjalannya musyawarah hanya berjalan secara monoton saja atau dengan kata lain hanya berjalan satu arah saja karena kurang mendapat tanggapan dari para peserta musrenbang itu sendiri.

Pada dasarnya Kepala Pekon Gumukrejo sudah cukup baik menjalankan perannya pada tahap ini yaitu memaparkan dengan baik mengenai prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pekon Gumukrejo tetapi kurangnya masukan-masukan ataupun tanggapan-tanggapan dari para peserta musrenbang yang datang sehingga menyebabkan proses

berjalannya musyawarah ini berjalan secara monoton.

**c. Pemaparan Kepala Pekon Atas Hasil Evaluasi Pembangunan 5 (lima) Tahun Sebelumnya**

Pada tahap ini Pekon Gumukrejo baru pertama kali menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sehingga pemaparan kepala pekon atas hasil evaluasi pembangunan 5 (lima) tahun sebelumnya belum bisa dilaksanakan. Pada tahap ini kepala pekon hanya mengevaluasi hasil pembangunan dari Pekon Gumukrejo ketika masih tergabung dengan Pekon Gumukmas. Kepala Pekon Gumukrejo mengevaluasi hasil pembangunan sarana umum seperti jalan Pekon yang masih kurang memadai. Hal ini sesuai dengan pernyataan oleh Bapak Somad selaku ketua LPM yang mengatakan :

“Belum ada yang dievaluasi karena Desa Gumukrejo baru pertama kali membuat RPJM sehingga yang dievaluasi hasil pembangunan dari Desa Gumukmas yang dulunya merupakan desa induk dari Desa Gumukrejo.”

Hal yang sama juga dinyatakan oleh Bapak Rohiman selaku Kepala Pekon Gumukrejo yang menyatakan :

“Desa Gumukrejo ini kan baru saja mekar dari Desa Gumukmas, RPJM saja baru dibuat satu kali ya jadi saya mengevaluasi pembangunan yang ada saja di sini yang dulunya di bangun oleh Desa Gumukmas seperti pembangunan sarana umum yang ada di desa yang kurang memadai seperti masih banyaknya jalan yang rusak.”

Pada tahap ini kepala pekon berperan dengan menjelaskan hasil evaluasi pembangunan yang ada di Pekon Gumukrejo ketika masih tergabung dengan Pekon Gumukmas. Pada dasarnya kepala pekon mengevaluasi hasil pembangunan sarana umum yang masih kurang memadai seperti masih banyaknya jalan yang rusak. Permasalahan kerusakan jalan di Pekon Gumukrejo merupakan permasalahan yang banyak dikeluhkan oleh warga pekon, hal ini dikarenakan sebagian besar jalan yang ada masih berupa jalan tanah yang apabila di musim penghujan jalan akan sangat susah untuk dilewati sehingga akan sangat mengganggu aktifitas warga pekon dalam menjalankan rutinitas setiap harinya.

Pada tahap ini Kepala Pekon sudah menjalankan tugasnya dengan baik yaitu dengan menjelaskan hasil evaluasinya mengenai pembangunan yang telah dilakukan pada saat Pekon Gumukrejo masih tergabung dengan Pekon Gumukmas. Hasil evaluasi pembangunan yang di paparkan oleh Kepala Pekon Gumukrejo yaitu berupa masih minimnya pembangunan jalan yang kondisinya cukup memprihatinkan sehingga perlu segera ditangani yaitu dengan melakukan perbaikan secepatnya sehingga dengan adanya jalan yang memadai maka aktifitas warga pekon akan bisa berjalan lebih lancar lagi.

**d. Pemaparan Kepala Pekon Atas Prioritas Program Kegiatan Untuk 5 (lima) Tahun Berikutnya Yang Bersumber Dari RPJM- Pekon**

Pada tahap ini Kepala Pekon Gumukrejo memaparkan prioritas program kegiatan untuk 5 (lima) tahun berikutnya yang bersumber dari RPJM

Pekon Gumukrejo yang sebelumnya telah disusun oleh tim penyusun rancangan RPJM Pekon Gumukrejo yang dibentuk oleh kepala pekon melalui surat keputusan kepala pekon yang ditandatangani oleh Kepala Pekon Gumukrejo yaitu Bapak Rohiman.

Tim penyusun rancangan RPJM ini bertugas untuk menyusun Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Pekon Gumukrejo untuk tahun 2011-2015 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Pekon, perumusan visi pekon yang dilakukan secara partisipatif, dan juga mendengarkan aspirasi dari masyarakat secara langsung ataupun melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Pekon Gumukrejo yang sebelumnya juga telah menyaring aspirasi masyarakat Pekon Gumukrejo tentang keluhannya mengenai masalah pembangunan yang ada di Pekon Gumukrejo ini. Setelah tim penyusun rancangan RPJM Pekon Gumukrejo menyelesaikan tugasnya kemudian hasilnya diserahkan kepada kepala pekon untuk di paparkan di dalam musrenbang.

Pada tahap ini Kepala Pekon Gumukrejo berperan dalam memaparkan prioritas program kegiatan untuk 5 (lima) tahun berikutnya yaitu pembangunan Balai Pekon Gumukrejo, pembanguna puskesmas, perbaikan jalan dengan melakukan pengerasan jalan, dan pembuatan talut serta gorong-gorong. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Rohiman selaku Kepala Pekon Gumukrejo yang mengatakan :

“Ya seperti yang saya sebutkan tadi mas, kegiatan pembangunan balai desa yang dilakukan secara bertahap, pembangunan puskesmas yang sekarang sudah berjalan, perbaikan jalan dengan melakukan pengerasan jalan dan pembuatan talut serta gorong-gorong agar air pada waktu musim hujan tidak membanjiri jalan.”

Hal yang sama juga dinyatakan oleh Bapak Darman selaku Sekretaris Pekon Gumukrejo yang mengatakan bahwa :

“Pada intinya kegiatan pembangunan sarana desa seperti balai desa yang dilakukan bertahap tiap tahunnya, untuk tahun pertama sudah dilakukan pembuatan pondasi dan tiang yang di cor, kemudian pengerasan jalan dan pembuatan talut/siring serta gorong-gorong di jalan-jalan yang ada di desa, dan satu lagi pembangunan puskesmas yang tujuannya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat desa seperti pelayanan pasyandu untuk balita.”

Pada proses pembangunan balai pekon dilakukan secara bertahap setiap tahunnya hal ini dikarenakan sumber dana untuk membangun balai pekon tersebut dari pemerintah daerah melalui ADP (Alokasi Dana Pekon) yang dicairkan secara berkala setiap tahunnya yang bersumber dari APBD. Untuk program pembangunan puskesmas yang sekarang telah dibangun di Dusun III bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang ada di Pekon Gumukrejo yang sumber dananya dari APBN melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan yang ada di Pekon Gumukrejo.

Pada program kegiatan perbaikan jalan, pembangunan talut, dan gorong-gorong dilakukan secara bertahap yang sumber dananya dari APBN melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, pada program perbaikan jalan untuk tahun pertama

atau tahun 2011 perbaikan jalan dilakukan di Dusun II dan untuk tahun 2012 ini dilakukan perbaikan jalan di Dusun I, pada program pembuatan siring telah dilakukan di Dusun I, kemudian pada program pembuatan gorong-gorong telah dilakukan di Dusun II.

Jika dilihat dari sumber pendanaannya dapat disimpulkan bahwa seluruh prioritas program kegiatan pembangunan yang ada di Pekon Gumukrejo bersumber dari APBN dan APBD. Hal ini mengakibatkan ketergantungan Pekon Gumukrejo terhadap bantuan dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Sehingga mengakibatkan apabila bantuan dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah tidak bisa dicairkan maka program pembangunan yang telah disusun tidak bisa dilaksanakan. Seharusnya Pekon Gumukrejo juga mencari sumber-sumber pendanaan lainnya untuk membiayai program pembangunan seperti meningkatkan pendapatan asli pekon dan mengumpulkan dana swadaya dari warga pekon sehingga dapat mengurangi ketergantungan bantuan dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.

Pada tahap ini Kepala Pekon Gumukrejo sudah menjalankan dengan baik perannya yaitu dengan menjelaskan kepada para peserta musrenbang mengenai prioritas program kegiatan pembangunan untuk 5 (lima) tahun yang bersumber dari RPJM. Penjelasan Kepala Pekon juga sudah cukup terperinci dan jelas.

**e. Penjelasan Kepala Pekon Mengenai Informasi Perkiraan Mengenai Jumlah Pembiayaan Kegiatan Pembangunan 5 (lima) Tahunan di Pekon**

Pada tahap ini Kepala Pekon Gumukrejo yaitu Bapak Rohiman telah menjalankan perannya dengan menjelaskan informasi perkiraan mengenai jumlah pembiayaan kegiatan pembangunan untuk 5 (lima) tahun kedepan kepada seluruh peserta musrenbang. Sumber dana dari kegiatan pembangunan Pekon Gumukrejo ini dari APBD dan APBN. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Rohiman selaku Kepala Pekon Gumukrejo yang mengatakan :

“Dari ADP dan PNPM Mandiri yang semuanya bersumber dari APBD/APBN.”

Alokasi Dana Pekon (ADP) merupakan alokasi dana dari Pemerintah Kabupaten Pringsewu untuk pembangunan infrastruktur pemerintahan yang ada di Pekon Gumukrejo. Alokasi Dana Pekon (ADP) ini bersumber dari APBD Kabupaten Pringsewu yang merupakan bantuan yang diberikan setiap tahunnya kepada Pekon Gumukrejo. Dana yang bersumber dari ADP ini digunakan untuk membangun fasilitas pemerintahan oleh Pekon Gumukrejo yaitu dialokasikan untuk pembangunan balai desa, hal ini dikarenakan keadaan balai desa yang dimiliki oleh Pekon Gumukrejo masih kurang layak dan terkesan apa adanya sehingga perlu perbaikan secara total Balai Pekon Gumukrejo guna menunjang kegiatan pemerintahan yang ada di Pekon Gumukrejo ini seperti kegiatan rapat yang diadakan di pekan, pemilihan kepala



pekon, dan acara-acara lain yang membutuhkan balai pekon sebagai tempatnya.

Pada pembangunan puskesmas, perbaikan jalan, pembangunan talut, dan gorong-gorong semuanya bersumber dari APBN yang melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan yang ada di Pekon Gumukrejo. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Darman selaku Sekretaris Pekon Gumukrejo yang mengatakan :

“Kalau untuk pembuatan balai desa itu dari dana ADP (Alokasi Dana Pekon) itu bantuan dari Pemerintah Kabupaten Pringsewu itu tiap tahun ada mas, tapi kalau untuk pengerasan jalan, pembuatan talut dan puskesmas itu dari PNPM Mandiri.”

Untuk mendapatkan bantuan dari PNPM Mandiri Pedesaan pihak pemerintah pekon harus terlebih dahulu mengajukan proposal kepada PNPM Mandiri Pedesaan yang ada di Pekon Gumukrejo dan kemudian apabila disetujui maka program yang dicanangkan akan dapat berjalan. Sehingga akan sangat penting Pemerintah Pekon Gumukrejo juga meminta arahan kepada PNPM Mandiri Pedesaan yang ada dalam penyusunan RPJM sehingga disaat pelaksanaan program pembangunan yang menjadi prioritas dalam RPJM yang disusun akan berjalan dengan baik, dengan alasan itu juga Pemerintah Pekon Gumukrejo meminta masukan kepada PNPM Mandiri Pedesaan yang ada untuk memberikan arahan dalam penyusunan RPJM. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Darman selaku Sekretaris Pekon Gumukrejo yang mengatakan :

“Kita mendapat bantuan dari Pemerintah Kabupaten dan PNPM Mandiri dengan cara mengajukan proposal saja kebetulan di desa kita ada orang PNPM Mandiri makanya kita juga minta bantuan dari orang tersebut untuk ikut merumuskan permasalahan pembangunan yang ada.”

Adanya masukan dari PNPM Mandiri Pedesaan yang ada maka arah pembangunan akan terarah dengan baik dan di dalam pelaksanaannya nanti dapat berjalan dengan baik sesuai rencana. Sehingga program pembangunan yang dijadikan prioritas yang telah disusun di dalam RPJM Pekon Gumukrejo akan dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan rencana.

Mengenai rincian perkiraan jumlah pembiayaan kegiatan pembangunan untuk 5 (lima) tahun kedepan para narasumber sewaktu diwawancarai semuanya mengatakan lupa dan menyarankan penulis untuk melihat di dalam RPJM Pekon Gumukrejo dan setelah dilihat jumlah total anggaran yang dibutuhkan untuk memenuhi rencana pembangunan yang ada di Pekon Gumukrejo tahun 2011-2015 yaitu sebesar Rp 2.649.000.000,- (dua miliar enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah).

**f. Penjelasan Koordinator Musrenbang Yaitu Ketua LKMD/LPM Atau Sebutan Lain Mengenai Tatacara Pelaksanaan Musyawarah**

Pada tahap ini koordinator musrenbang menjelaskan tentang tatacara pelaksanaan musyawarah yaitu dengan menjelaskan tahapan dalam acara musrenbang Pekon Gumukrejo yang dilaksanakan pada hari kamis, tanggal 2 Desember 2010 di Balai Pekon Gumukrejo. Hal ini

sesuai dengan pernyataan Bapak Somad selaku ketua LPM yang menyatakan :

“Dengan menjelaskan tahapan yang akan dilakukan dalam Musrenbang seperti sambutan dari kepala desa, sambutan dari PJOK, pemaparan prioritas pembangunan oleh kepala desa, pemaparan potensi dan masalah oleh LPM, pemaparan RPJM Desa Gumukrejo tahun 2011-2015 oleh LPM, pemaparan RKP Desa Gumukrejo tahun 2011 oleh LPM, tanggapan oleh peserta muasrenbang, dan pengesahan RPJM oleh kepala desa melalui peraturan desa.”

Pada tahap pertama yaitu berupa sambutan dari Kepala Pekon Gumukrejo yaitu Bapak Rohiman, kemudian dilanjutkan sambutan dari PJOK (Penanggung Jawab Operasional Kecamatan) yaitu oleh Bapak Agung Wibowo. Pada tahap selanjutnya Kepala Pekon Gumukrejo yaitu Bapak Rohiman memaparkan prioritas pembangunan yang direncanakan untuk 5 (lima) tahun kedepan seperti pembangunan Balai Pekon Gumukrejo yang akan dilaksanakan secara bertahap setiap tahunnya, kemudian pembangunan puskesmas, perbaikan jalan pekon yang akan dilaksanakan secara bertahap, pembuatan talut atau siring untuk mencegah meluapnya air ke jalan disaat musim hujan, dan juga pembuatan gorong-gorong.

Pada tahap selanjutnya memaparkan potensi dan masalah oleh LPM. Pada tahap ini diwakili oleh ketua LPM sendiri yaitu Bapak Somad, ia memaparkan potensi dan masalah yang ada di Pekon Gumukrejo. Potensi yang ada di Pekon Gumukrejo ini yaitu berupa sumberdaya alam seperti lahan kosong, sungai, sawah, kebun/tegalan, dan

pegunungan. Potensi Sumberdaya Manusia yang dimiliki Pekon Gumukrejo yaitu tenaga kerja, kader kesehatan, kader pertanian, dan ketersedianya SDM yang cukup memadai yang dilihat dari tingkat pendidikan.

Potensi sumberdaya sosial yang dimiliki Pekon Gumukrejo yaitu banyaknya lembaga yang ada dimasyarakat seperti LPM, Gapoktan. Kelompok pengajian, arisan, kelompok simpan pinjam, posyandu, karangtaruna, risma, PKK, dan lain-lain. Kemudian potensi sumberdaya ekonomi yang ada di Pekon Gumukrejo yaitu adanya lahan-lahan pertanian, perkebunan, peternakan maupun perikanan.

Permasalahan-permasalahan yang dipaparkan oleh ketua LPM yaitu permasalahan di bidang sarana dan prasarana fisik yang ada di Pekon Gumukrejo seperti rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam berswadaya dan pemeliharaan bangunan, lokasi pembangunan yang tidak merata, keterbatasan dana pembangunan yang dikelola oleh pekon. pada bidang ekonomi yang ada di Pekon Gumukrejo yaitu belum adanya pengembangan terhadap potensi ekonomi pekon, keterbatasan dana untuk modal, dan belum adanya pendidikan ketrampilan bagi masyarakat.

Pada bidang sosial budaya yang ada di Pekon Gumukrejo yaitu pembangunan non fisik/moral yang masih terabaikan, belum optimalnya pengembangan budaya loka pekon, dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang kebudayaan. Pada bidang pemerintahan yang ada di

Pekon Gumukrejo yaitu terbatasnya sumberdaya manusia dalam pelaksanaan pemerintahan, aparat pemerintahan belum secara jelas mengetahui tupoksinya masing-masing. Pada bidang kesehatan yang ada di Pekon Gumukrejo yaitu belum adanya tempat pelayanan kesehatan yang memadai dan pemanfaatan posyandu yang belum optimal.

Pada bidang kelembagaan yang ada di Pekon Gumukrejo yaitu masih rendahnya pemahaman terhadap tupoksi dari kelembagaan yang ada di pekon, tingkat pertemuan atau rapat koordinasi yang masih kurang, belum tersusunnya program kerja yang jelas, dan kurangnya koordinasi antar sesama anggota. Pada bidang kamtibmas yang ada di Pekon Gumukrejo yaitu kegiatan masyarakat dalam siskamling belum optimal dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mentaati aturan yang ada. Pada bidang lingkungan hidup yang ada di Pekon Gumukrejo yaitu masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan, belum tersedianya tempat pembuangan sampah yang memadai, dan pemanfaatan air bersih belum optimal.

Pada bidang partisipasi masyarakat yang ada di Pekon Gumukrejo yaitu partisipasi masyarakat dalam pertemuan yang diadakan di pekon masih kurang, kegiatan gotong royong yang masih kurang, dan masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam kegiatan sosial. Pada bidang pertanian yang ada di Pekon Gumukrejo yaitu saluran irigasi belum tertata dengan baik, gapoktan belum berjalan dengan baik,

kekurangan air pada musim kemarau, dan belum adanya jalan yang memadai menuju persawahan.

Pada bidang hukum yang ada di Pekon Gumukrejo yaitu masih dijumpai pelanggaran peraturan yang ada di pekon dan adanya alergi terhadap aparat penegak hukum. Pada bidang perindustrian dan perdagangan yang ada di Pekon Gumukrejo yaitu industri rumah tangga yang belum dikembangkan, kesulitan dalam penambahan modal, SDM yang kurang memadai, kesulitan dalam pencarian modal, dan kesulitan dalam mengurus surat izin usaha. Pada bidang pertanahan yang ada di Pekon Gumukrejo yaitu masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuat surat kepemilikan tanah, pemasangan batas tanah yang kurang jelas, masih mahalnya dalam mengurus surat tanah.

Pada tahap selanjutnya yaitu pemaparan RPJM Pekon Gumukrejo tahun 2011-2015 oleh LPM yang diwakili oleh ketua LPM yaitu Bapak Somad yang menjelaskan tentang isi dari RPJM yang telah disusun oleh tim penyusun rancangan RPJM yang sebelumnya telah dibentuk oleh kepala pekon yang beranggotakan Bapak Rohiman, Darman, Somad, Agung Wibowo, Maryani, Sukowo, Kasino, dan Madiyo Suwito. Setelah itu ketua LPM juga menjelaskan rincian dari RKP untuk tahun 2011.

Pada tahap selanjutnya yaitu tanggapan dari peserta musrenbang mengenai prioritas pembangunan yang disampaikan oleh kepala pekon, potensi dan masalah yang ada di pekon, rancangan RPJM pekon

Gumukrejo, dan RKP Pekon Gumukrejo untuk tahun 2011. Pada tahap ini para peserta musrenbang menanggapi dan memberikan usulan dan menyalurkan aspirasinya mengenai usulan rancangan RPJM Pekon Gumukrejo yang telah disusun oleh tim penyusun yang sebelumnya telah dibentuk, apakah sudah sesuai atau perlu adanya perubahan dari isi RPJM tersebut. Jika telah dianggap sesuai isi dari RPJM Pekon Gumurejo oleh peserta musrenbang, maka para peserta akan menyetujui RPJM Pekon Gumukrejo tersebut dan akan segera disahkan oleh kepala desa sebagai Peraturan Pekon.

Pada tahap yang terakhir yaitu pengesahan RPJM Pekon Gumukrejo oleh kepala pekon dengan menerbitkan RPJM Pekon Gumukrejo sebagai Peraturan pekon yang sebelumnya meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Badan Permusyawaratan Pekon mengenai rancangan RPJM Pekon Gumukrejo yang telah disusun oleh tim penyusun dan di juga telah dilakukan musyawarah dalam musrenbang.

Pada tahapan ini pada intinya koordinator musrenbang menjelaskan secara terperinci mengenai tahapan-tahapan tentang tatacara yang akan dilakukan dalam musrenbang, sehingga proses berjalannya musrenbang dapat berjalan dengan lancar dan keputusan-keputusan yang diambil dalam musrenbang ini dapat sesuai dengan aspirasi masyarakat dan juga diputuskan dengan musyawarah secara mufakat.

Pada tahap ini ketua LPM telah menjalankan perannya dengan baik yaitu dengan menjelaskan tahapan-tahapan dan tatacara musyawarah dalam musrenbang, karena pada dasarnya LPM merupakan koordinator dalam musyawarah perencanaan pembangunan yang ada di Pekon Gumukrejo. Seperti yang telah dibahas pada tinjauan pustaka bahwa LPM bertugas dalam menyusun rencana pembangunan secara partisipatif dan rencana pembangunan tersebut selanjutnya disebut RPJM yang disusun dalam acara musrenbang atau musyawarah perencanaan pembangunan. Sehingga peran LPM dalam proses penyusunan RPJM dari tahap awal hingga akhir cukup besar.

Pada dasarnya LPM merupakan mitra dari pemerintah pekon dalam hal yang berhubungan dengan urusan pembangunan sehingga terciptanya rencana pembangunan yang partisipatif itu tidak bisa terlepas dari campur tangan LPM dalam proses penyusunannya. LPM juga bertugas untuk menyerap aspirasi dari masyarakat dalam hal pembangunan yang nanti kemudian disampaikan kepada pemerintah pekon sebagai rekomendasi dalam hal penyusunan rencana pembangunan yang selanjutnya disebut RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah).

**g. Pemaparan Masalah Utama Yang Dihadapi Oleh Masyarakat Pekon Oleh Beberapa Perwakilan Masyarakat, Antara Lain Oleh Ketua Kelompok Tani, Komite Sekolah, dan Kepala Dusun**

Pada tahap ini pemaparan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pekon diwakili oleh para kepala dusun atau kadus dan juga ketua gapoktan. Kepala dusun menyampaikan keluhannya mengenai



permasalahan yang dihadapi di wilayahnya seperti kerusakan jalan sehingga perlu dilakukan perbaikan jalan, pembangunan puskesmas, pembangunan balai pekon, pembuatan talut dan juga gorong-gorong, sedangkan ketua gapoktan memaparkan permasalahan perlu dilakukannya perbaikan saluran irigasi menuju persawahan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Darman selaku Sekretaris Pekon Gumukrejo yang menyatakan :

“Para kepala dusun, yang memaparkan tentang kerusakan jalan yang ada di dusunnya, perlunya dibangun talut, gorong-gorong, puskesmas, dan balai desa dan juga ketua gapoktan yang meminta untuk perbaikan saluran air atau irigasi ke persawahan.”

Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Somad selaku ketua LPM yang mengatakan bahwa :

“Masalah perbaikan sarana pemerintahan desa seperti pembangunan balai desa, perbaikan jalan dan gorong-gorong, serta pembuatan talut, selain itu juga permasalahan pelayanan kesehatan yang perlu ditingkatkan sehingga perlu dibangunnya puskesmas dan perbaikan saluran irigasi ke persawahan.”

Setelah permasalahan-permasalahan yang ada dipaparkan oleh para peserta musrenbang, kemudian dimusyawarahkan oleh seluruh peserta musrenbang untuk dicari solusinya dan apabila telah ditemukan solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut dan dianggap perlu untuk segera diselesaikan, maka oleh para peserta musrenbang akan dijadikan prioritas kegiatan yang nantinya akan dimasukkan dalam RPJM Pekon Gumukrejo. Hal ini mengindikasikan bahwa di dalam memutuskan suatu permasalahan yang ada dilakukan melalui musyawarah secara mufakat

dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.

Pada saat musyawarah untuk mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang telah disampaikan oleh peserta musrenbang, peran LPM di sini cukup besar, sebagai koordinator musrenbang LPM harus bisa membuat jalannya musyawarah dapat berjalan dengan baik. Pada tahapan ini seperti yang telah di singgung sebelumnya para peserta musrenbang kurang kooperatif dalam memberikan saran ataupun usulan mengenai permasalahan-permasalahan yang telah disampaikan sebelumnya oleh para kepala dusun dan ketua gapoktan. Hal ini menyebabkan kurang efektifnya proses perumusan masalah untuk dicari solusi terhadap permasalahan yang ada.

Peserta musrenbang seharusnya untuk lebih aktif lagi dalam memberikan usulan ataupun saran terhadap penyelesaian permasalahan yang ada, sehingga keputusan-keputusan yang diambil akan sesuai dengan kehendak ataupun kemauan warga Pekon Gumukrejo. Pada tahap ini LPM berperan lebih mendominasi dalam mengawal proses jalannya musyawarah untuk mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang telah disampaikan oleh peserta musrenbang.

#### **h. Pemisahan Kegiatan Berdasarkan Kegiatan Yang Akan Deselesaikan Sendiri di Tingkat Pekon dan Kegiatan Yang Menjadi Tanggung Jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Akan Dibahas Dalam Musrenbang Tahunan Kecamatan**

Pada tahap ini pemisahan kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat pekon dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja

Perangkat Daerah yang akan dibahas dalam musrenbang tahunan kecamatan dilakukan oleh seluruh peserta musrenbang, termasuk LPM dan kepala pekon yang berperan aktif dalam kegiatan ini. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Eka Setiawan selaku Kepala Urausan Pemerintahan yang menyatakan bahwa dalam kegiatan ini yang melibatkan yaitu:

“Seluruh peserta Musrenbang yang ada termasuk LPM dan Kepala Desa.”

Di dalam tahap ini permasalahan yang dipisahkan untuk di bawa dalam musrenbang tingkat kecamatan yaitu permasalahan perbaikan jalan yang menghubungkan antar pekon yaitu Pekon Gumukrejo dengan Pekon Karang Sari sehingga perlu dikonsultasikan terlebih dahulu di tingkat kecamatan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Eka Setiawan selaku Kepala Urausan Pemerintahan yang mengatakan bahwa :

“Permasalahan perbaikan jalan yang menghubungkan antar desa itu yang perlu dipisahkan dan perlu dikonsultasikan dulu dengan kecamatan untuk dicari solusinya dikarenakan memerlukan pembiayaan yang besar untuk perbaikan jalan tersebut.”

Permasalahan tersebut dianggap perlu diangkat dalam musrenbang tingkat kecamatan dikarenakan dalam pembiayaanya akan menelan anggaran yang cukup besar hal ini dikarenakan pembangunan jalan ini akan menghubungkan antar pekon yaitu Pekon Gumukrejo dengan Pekon Karang Sari, dengan demikian maka menurut para peserta musrenbang permasalahan ini perlu diangkat dalam musrenbang

tahunan tingkat kecamatan.

Peran dari LPM pada tahap ini lebih tertuju pada mengkoordinir jalannya musyawarah yang dilakukan oleh para peserta musrenbang untuk memisahkan kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat desa dengan kegiatan yang akan dibawa dalam musrenbang kecamatan. LPM menjadi fasilitator dalam jalannya musyawarah, hal ini dikarenakan LPM sendiri merupakan koordinator musrenbang sehingga secara langsung harus berperan aktif dalam musrenbang termasuk pada tahap untuk memisahkan kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat desa dengan kegiatan yang akan dibawa dalam musrenbang kecamatan.

LPM dan kepala pekon berperan aktif pada tahap ini, tetapi LPM lah yang lebih mendominasi dalam mengkoordinir jalannya acara pada tahapan ini. Karena seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa LPM merupakan koordinator dalam acara musrenbang sehingga secara langsung berkewajiban untuk mengawal jalannya musrenbang agar dapat berjalan dengan baik yang hasil dari musrenbang ini sesuai dengan kemauan ataupun kehendak dari warga Pekon Gumukrejo.

**i. Perumusan Para Peserta Mengenai Prioritas Untuk Menyeleksi Usulan Kegiatan Sebagai Cara Mengatasi Masalah Oleh Peserta**

Pada tahap ini para peserta menyeleksi usulan kegiatan yang akan dijadikan prioritas, pada tahap ini diikuti oleh seluruh peserta yang hadir dalam musrenbang termasuk dari LPM, kepala pekon dan perangkatnya.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Somad selaku ketua LPM yang mengatakan bahwa :

“Yang mengikuti ya seluruh peserta Musrenbang termasuk LPM, kepala desa dan perangkatnya.”

Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Rohiman selaku Kepala Pekon Gumukrejo yang mengatakan :

“Seluruh peserta musrenbang termasuk LPM, kepala desa dan perangkatnya, serta dibantu oleh PNPM Mandiri untuk memberikan masukan-masukannya. Masukan dari masyarakat yang hadir juga dibuat sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kegiatan pembangunan yang akan menjadi prioritas di Desa Gumukrejo.”

Di dalam tahap ini PNPM Mandiri Pedesaan juga memberikan masukan kepada peserta musrenbang dalam menentukan usulan kegiatan yang akan menjadi prioritas yang nantinya akan dimasukkan di dalam RPJM Pekon Gumukrejo. Tidak hanya PNPM Mandiri Pedesaan saja yang memberikan masukan, tetapi masukan dari masyarakat yang hadir juga dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan usulan kegiatan yang akan menjadi prioritas. Masukan dari para peserta musrenbang sendiri sangat kurang karena para peserta musrenbang sendiri yang datang kurang mengetahui pokok permasalahan yang ada dan juga warga pekon yang datang dalam musrenbang hanya sekedar pelengkap saja, yang penting hadir dan tidak memberikan masukan ataupun tanggapan terhadap permasalahan yang dihadapi untuk dicari solusinya. Maka dari itu LPM dan kepala pekon dituntut untuk berperan aktif dalam mengawal jalannya musrenbang agar dapat berjalan lebih baik lagi.

Peran dari LPM dan kepala pekon disini sangat besar, hal ini dikarenakan keduanya merupakan aktor utama dalam penyusunan RPJM Pekon Gumukrejo. Seperti diketahui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan suatu lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah pekon yang dipimpin oleh seorang kepala pekon dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan kepala pekon sama-sama berperan aktif dalam menyeleksi usulan kegiatan yang akan dijadikan prioritas sehingga kedua lembaga ini cukup mendominasi dalam tahap ini. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Rohiman selaku Kepala Pekon Gumukrejo yang mengatakan :

“Yang mendominasi itu ya LPM dan kepala desa, soalnya LPM kan tugasnya yang berhubungan dengan pembangunan yang ada di desa dan kepala desa sendiri merupakan seorang yang mengepalai pemerintah desa. Usulan-usulan pembangunan juga sebagian besar dari mereka ya secara otomatis mereka lebih mendominasi dalam menentukan prioritas pembanguna.”

Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Darman selaku Sekretaris Pekon Gumukrejo yang mengataka bahwa :

“Yang mendominasi itu yang dari LPM dan kepala desa, pada dasarnya mereka yang mengusulkan rencana pembangunan yang ada di desa, dari pihak pemerintah desa juga ikut andil bagian dalam proses perumusan ini, karena mau bagaimanapun rencana pembangunan desa harus melibatkan semua unsur pemerintahan yang ada di desa.”

Jika dilihat dari tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan kepala pekon, di dalam tahap ini keduanya sama-sama sudah menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik. Seperti yang sudah di jelaskan di dalam tinjauan pustaka atau BAB II, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang salah satunya tugasnya menyusun rencana pembangunan secara partisipatif dan kepala pekon salah satunya tugasnya menyelenggarakan urusan pembangunan.

Maksud dari tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang menyusun rencana pembangunan secara partisipatif adalah di dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan melibatkan berbagai unsur masyarakat dan juga pemerintahan pekon sehingga segala sesuatu yang diputuskan yang berhubungan dengan tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dilakukan secara terbuka dan demokratis. Sedangkan maksud dari tugas kepala pekon yang menyelenggarakan urusan pembangunan adalah memberdayakan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum pekon seperti jalan pekon, puskesmas, saluran irigasi, dan lain-lain.

Kegiatan-kegiatan yang diputuskan untuk di jadikan prioritas yaitu pembangunan balai pekon, pembangunan puskesmas, perbaikan jalan, pembuatan talut, dan gorong-gorong. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Darman selaku Sekretaris Pekon Gumukrejo yang mengatakan bahwa :

“Ya itu tadi yang jelas usulan pembangunan balai desa yang dilaksanakan secara bertahap setiap tahunnya, kemudian pembangunan puskesmas yang alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik, perbaikan jalan, talut/siring dan gorong-gorong yang dilaksanakan secara bertahap pula.”

Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Kasino selaku Kepala Dusun

III yang mengatakan bahwa :

“Kegiatan pembangunan balai desa, pembangunan puskesmas, perbaikan jalan, dan juga pembuatan talut serta gorong-gorong.”

Pada tahap ini proses pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah secara mufakat yang dilakukan oleh seluruh peserta musrenbang, usulan-usulan kegiatan yang dijadikan prioritas dari peserta musrenbang baik itu dari LPM maupun dari hasil kerja tim penyusun rancangan RPJM yang sebelumnya telah dibentuk oleh kepala pekon maupun masukan-masukan dari peserta musrenbang lainnya diputuskan secara bersama-sama sampai tercapai kata sepakat oleh seluruh peserta musrenbang. Dengan demikian maka proses perumusan para peserta mengenai pembangunan apa saja yang akan di jadikan prioritas diputuskan melalui musyawarah secara mufakat.

**j. Penempatan Prioritas Kegiatan Pembangunan Yang Akan Datang Sesuai Dengan Potensi Serta Permasalahan Pekon**

Pada tahap ini ditetapkan prioritas kegiatan pembangunan sesuai dengan potensi serta permasalahan yang ada. Prioritas kegiatan pembangunan yang ditetapkan pada tahap ini yaitu kegiatan pembangunan balai pekon yang akan dilaksanakan secara bertahap setiap tahunnya, pembangunan



puskesmas untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di pekon, perbaikan jalan pekon guna memperlancar aktifitas warga pekon, pembuatan talut dan juga gorong-gorong untuk menghindari terjadinya genangan air pada musim penghujan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Tulus selaku Kepala Urusan Pembangunan Pekon Gumukrejo yang mengatakan :

“Yaitu tadi pembangunan balai desa secara bertahap, pembangunan puskesmas untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, perbaikan jalan, gorong-gorong, serta pembangunan talut.”

Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Somad selaku Ketua LPM yang mengatakan bahwa :

“Pembangunan balai desa, perbaikan jalan, pembuatan talut dan gorong-gorong, serta pembangunan puskesmas.”

Diputuskannya kegiatan pembangunan yang akan diprioritaskan ini dilakukan melalui musyawarah yang diikuti oleh seluruh peserta musrenbang yang ada. Dasar dari diputuskannya kegiatan pembangunan yang menjadi prioritas tersebut yaitu karena sesuai dengan potensi serta permasalahan pekon yang ada. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa di Pekon Gumukrejo perlu dibangunnya balai pekon yang layak, hal ini sangat dibutuhkan agar nantinya apabila akan diadakan acara musyawarah tingkat pekon maka telah memiliki tempat yang lebih layak. Selain itu perlunya pembangunan puskesmas yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Pekon Gumukrejo, perbaikan jalan pekon yang bertujuan untuk mempermudah

mobilitas warga pekon setiap harinya, serta pembangunan talut dan gorong-gorong untuk menghindari adanya genangan air diwaktu musim penghujan.

LPM dan kepala pekon berperan aktif pada tahap ini, hal ini dapat terlihat dari pernyataan Bapak Darman selaku Sekretaris Pekon Gumukrejo yang mengatakan bahwa :

“LPM dan kepala desa berperan aktif dalam memutuskan prioritas kegiatan pembangunan yang akan datang.”

Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Bapak Ahmadi selaku ketua BPD yang mengatakan bahwa :

“LPM dan kepala desa berperan aktif dalam menentukan prioritas pembangunan.”

LPM dan kepala pekon berperan aktif dalam memutuskan prioritas pembangunan, hal ini dikarenakan LPM merupakan lembaga yang dibentuk untuk mengurus permasalahan pembangunan yang ada di pekon dan juga mitra pemerintah pekon yang dipimpin oleh kepala pekon dalam urusan pembangan yang ada di Pekon Gumukrejo. Sehingga LPM dan kepala pekon memiliki peran yang sangat penting guna terciptanya rancangan pembangunan yang yang sesuai dengan aspirasi mayarakat.

**k. Penempatan Daftar Nama 3-5 Orang Masyarakat Yang Komposisinya Ada Perwakilan Perempuan, Delegasi Dari Peserta Musrenbang Pekon Untuk Menghadiri Musrenbang Kecamatan**

Pada tahap ini ditempatkan delegasi dari peserta musrenbang Pekon Gumukrejo untuk menghadiri musrenbang kecamatan. Delegasi yang ditempatkan untuk menghadiri musrenbang kecamatan yaitu Bapak Agung Wibowo dan Ibu Maryani. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Somad selaku ketua LPM yang mengatakan bahwa :

“Yang ditempatkan untuk menghadiri musrenbang kecamatan itu Bapak Agung Wibowo dan Bu Maryani.”

Hal senada juga di katakan oleh Bapak Rohiman selaku Kepala Pekon Gumukrejo yang mengatakan bahwa :

“Yang ditempatkan untuk menghadiri musrenbang kecamatan itu mas Agung dan mbak Maryani.”

Berdasarkan kedua delegasi yang akan ditempatkan untuk menghadiri musrenbang kecamatan yang komposisinya salah satunya ada perwakilan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya keterwakilan perempuan yang nantinya akan membawa aspirasi perempuan untuk disampaikan pada musrenbang kecamatan. Tetapi pada tahap ini Desa Gumukrejo hanya menempatkan 2 (dua) orang delegasi sehingga kurang memenuhi kuota yang disediakan yaitu yang berjumlah 3 sampai 5 orang untuk masing-masing delegasi pada setiap desa untuk menghadiri musrenbang kecamatan.

Tidak terpenuhinya kuota penempatan delegasi yang ditugaskan untuk menghadiri musrenbang kecamatan, hal ini mengindikasikan bahwa LPM dan kepala pekon dalam mengkoordinir jalannya musrenbang belum menjalankan perannya dengan baik karena hanya ada 2 (dua) orang saja yang ditempatkan untuk menghadiri musrenbang. Seharusnya agar sesuai dengan aturan delegasi yang ditetapkan berjumlah 3 sampai 5 orang delegasi pada setiap pekon untuk menghadiri musrenbang kecamatan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pada tahap penempatan daftar nama 3-5 orang masyarakat yang komposisinya ada perwakilan perempuan, delegasi dari peserta musrenbang pekon untuk menghadiri musrenbang kecamatan, LPM dan Kepala Pekon Gumukrejo belum menjalankan perannya dengan baik dikarenakan delegasi yang ditempatkan tidak memenuhi kuota yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa, pada pasal 10 ayat 2.

### **3. Pelembagaan**

Pada tahap ini dilakukan pemasyarakatan hasil musyawarah perencanaan pembangunan di pekon, hal tersebut dilakukan melalui forum atau pertemuan secara formal ataupun informal, papan pengumuman, surat edaran dan lain-lain. Kegiatan pelembagaan ini dilakukan melalui acara pengajian rutin yang biasanya dilakukan pada malam jumat, hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Somad selaku ketua LPM yang mengatakan :

“Dengan cara mensosialisasikan pada acara pengajian rutin yang biasanya diselenggarakan setiap malam jumat.”

Hal yang senada juga dikatan oleh Bapak Rohiman selaku Kepala Pekon Gumukrejo yang mengatakan bahwa :

“Kegiatan pelebagaan ini dilakukan dengan cara diumumkan dalam acara pengajian rutin setiap malam jumat.”

Kegiatan pelebagaan ini dilakukan pada saat pengajian rutin yang biasanya dilakukan pada malam jumat, hal ini dikarenakan pada saat itulah biasanya warga pekon berkumpul dan dianggap tepat untuk mengumumkan hasil musrenbang yang telah dilaksanakan. Kegiatan ini dilakukan oleh LPM, kepala pekon, ataupun perangkatnya dan juga dibantu oleh kepala dusun yang ada. Kendala yang dihadapi pada saat melakukan kegiatan ini adalah warga pekon kurang merespon pada hasil musrenbang yang diumumkan sehingga kegiatan pelebagaan ini kurang maksimal.

Peran LPM dan kepala pekon pada tahap ini yaitu mengkoordinir para aparat Pemerintahan Pekon Gumukrejo dalam memasyarakatkan hasil musrenbang yang telah dilaksanakan sebelumnya melalui kegiatan pengajian rutin setiap malam jumat ataupun jumat siangnya. Untuk lebih memaksimalkan kegiatan pelebagaan ini seharusnya dilakukan dengan cara yang lainnya, tidak hanya diumumkan dalam pengajian rutin saja. Seharusnya kegiatan pelebagaan ini juga dilakukan dengan cara membuat surat edaran ataupun menempelkan pada papan pengumuman

yang ada dibalai pekon, pos ronda atau tempat-tempat strategis lainnya yang mudah dibaca oleh warga Pekon Gumukrejo.

Untuk lebih mudahnya dalam membedakan peran LPM dan Kepala Pekon Gumukrejo dalam penyusunan RPJM Pekon Gumukrejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu dapat dilihat melalui table dibawah ini :

Tabel 10. Matrikulasi Peran LPM dan Kepala Pekon Dalam Penyusunan RPJM

<b>PERAN</b>	
<b>LPM</b>	<b>KEPALA PEKON</b>
<p><b><u>Persiapan</u></b></p> <p>1) Bersama-sama dengan Kepala Pekon menentukan jadwal dan agenda Musrenbang Pekon Gumukrejo.</p> <p>2) Mengkoordinir para kadus dan RT dalam dalam mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai agenda Musrenbang.</p> <p>3) Mengkoordinir terbentuknya panitia Musrenbang Pekon Gumukrejo.</p> <p>4) Bersama-sama dengan Kepala Pekon Gumukrejo mengkoordinir dalam mengundang para calon peserta musrenbang desa.</p> <p><b><u>Pelaksanaan</u></b></p> <p>1) Bersama-sama dengan Kepala Pekon Gumukrejo Mengkoordinir proses pendaftaran peserta musrenbang.</p> <p>2) Memaparkan kepada para peserta musrenbang mengenai tatacara pelaksanaan musyawarah.</p> <p>3) Bersama-sama dengan Kepala Pekon Gumukrejo mengkoordinir dalam pemisahan permasalahan yang akan diselesaikan di tingkat pekon dengan</p>	<p><b><u>Persiapan</u></b></p> <p>1) Bersama-sama dengan LPM menentukan jadwal dan agenda Musrenbang Pekon Gumukrejo.</p> <p>2) Bersama-sama dengan LPM mengkoordinir dalam mengundang para calon peserta musrenbang.</p> <p>3) Membentuk tim penyusun rancangan RPJM Pekon Gumukrejo.</p> <p><b><u>Pelaksanaan</u></b></p> <p>1) Bersama-sama dengan LPM Mengkoordinir proses pendaftaran peserta musrenbang.</p> <p>2) Memaparkan prioritas kegiatan pembangunan di Pekon Gumukrejo.</p> <p>3) Memaparkan Hasil Evaluasi Pembangunan Pekon Gumukrejo 5 (lima) Tahun Sebelumnya.</p> <p>4) Memaparkan prioritas program kegiatan untuk 5 (lima) tahun berikutnya yang bersumber dari RPJM Pekon Gumukrejo.</p>

<p>kegiatan yang menjadi tanggung jawab SKPD yang akan dibahas dalam musrenbang kecamatan.</p> <p>4) Bersama-sama dengan Kepala Pekon Gumukrejo mengkoordinir dalam penempatan prioritas kegiatan pembangunan yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan pekon.</p> <p>5) Bersama-sama dengan Kepala Pekon Gumukrejo mengkoordinir dalam penempatan daftar nama 3-5 orang masyarakat yang komposisinya ada perwakilan perempuan, delegasi dari peserta musrenbang pekon untuk menghadiri musrenbang kecamatan.</p> <p><b><u>Pelebagaan</u></b></p> <p>1) Bersama-sama dengan Kepala Pekon Gumukrejo mengkoordinir aparat Pemerintahan Pekon Gumukrejo dalam memasyarakatkan hasil musrenbang.</p>	<p>5) Menjelaskan mengenai informasi perkiraan jumlah pembiayaan kegiatan pembangunan 5 (lima) tahunan.</p> <p>6) Bersama-sama dengan LPM Mengkoordinir dalam pemisahan permasalahan yang akan diselesaikan di tingkat pekon dengan kegiatan yang menjadi tanggung jawab SKPD yang akan dibahas dalam musrenbang kecamatan.</p> <p>7) Bersama-sama dengan LPM mengkoordinir dalam penempatan prioritas kegiatan pembangunan yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan pekon.</p> <p>8) Bersama-sama dengan LPM mengkoordinir dalam penempatan daftar nama 3-5 orang masyarakat yang komposisinya ada perwakilan perempuan, delegasi dari peserta musrenbang pekon untuk menghadiri musrenbang kecamatan.</p> <p><b><u>Pelebagaan</u></b></p> <p>1) Bersama-sama dengan LPM mengkoordinir aparat Pemerintahan Pekon Gumukrejo dalam memasyarakatkan hasil musrenbang.</p>
--	--